

Strategi Komunikasi Pengelolaan Sampah di Kota Ambon: Perspektif SCCT dan Konstruksi Sosial

Christ J. Belseran ¹⁾; Ridzki Rinanto Sigit ²⁾

^{1,2)} *Sekolah Pascasarjana, Universitas Sahid Jakarta*

Email: ¹⁾ christbelseran5@gmail.com; ²⁾ ridzki_rinanto@usahid.ac.id

How to Cite :

Belseran. C. J., Sigit. R. R. (2026). Strategi Komunikasi Pengelolaan Sampah di Kota Ambon: Perspektif SCCT dan Konstruksi Sosial. *Jurnal Media Computer Science*, 5(1)

ARTICLE HISTORY

Received [04 Agustus 2025]

Revised [25 Januari 2026]

Accepted [27 Januari 2026]

KEYWORDS

Waste, Crisis Communication, SCCT, Social Construction, Ambon, River.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Ambon dengan pendekatan teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dan Teori Konstruksi Sosial. Studi ini dilakukan melalui metode studi kasus kualitatif di kawasan bantaran sungai Way Batu Merah dan Way Ruhu Galala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan membuang sampah ke sungai merupakan hasil konstruksi sosial yang sudah berlangsung lama dan diperkuat oleh lemahnya infrastruktur serta komunikasi publik. Strategi komunikasi pemerintah masih didominasi oleh pendekatan bolstering dan diminishing, sementara rebuilding dan attenuating belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk memahami kecenderungan perilaku masyarakat serta pengembangan komunikasi publik berbasis budaya lokal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the waste management communication strategy by the Ambon City government using the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) and the Social Construction Theory. This research employed a qualitative case study approach in the riverbank areas of Way Batu Merah and Way Ruhu Galala. The results show that the behavior of disposing waste into the river is a long-standing social construction reinforced by weak infrastructure and public communication. The government's communication strategy still relies heavily on bolstering and diminishing approaches, while rebuilding and attenuating are not yet optimal. The study recommends integrating the Theory of Planned Behavior (TPB) to understand community behavioral tendencies better and to develop culturally rooted public communication strategies.

PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah menjadi tantangan global yang semakin kompleks, terutama di kawasan perkotaan. Menurut laporan *What a Waste 2.0*, jumlah sampah dunia diperkirakan akan meningkat dari 2,01 miliar ton pada tahun 2016 menjadi 3,4 miliar ton pada 2050 jika tidak ada intervensi serius (World Bank, 2018a). Di Indonesia, persoalan sampah juga menjadi isu kritis, dengan capaian nasional pengurangan dan penanganan sampah yang pada 2023 masing-masing baru mencapai 27,27% dan 54,51% dari target (SIPSN, 2023). Survei ECOTON (2023) juga menunjukkan bahwa 80% masyarakat menilai pemerintah abai dalam pengelolaan sungai dan

limbah domestik. Kota Ambon, sebagai wilayah pesisir dan pusat aktivitas ekonomi di Maluku, menghadapi permasalahan serupa dengan penumpukan sampah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi krisis yang efektif. Pendekatan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dari Coombs menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana otoritas kota merespons krisis ini berdasarkan persepsi publik atas tanggung jawab mereka (Coombs, 2007). Di sisi lain, teori konstruksi sosial menjelaskan bagaimana realitas persoalan sampah dibentuk melalui wacana media, interaksi sosial, dan narasi publik yang memengaruhi perilaku masyarakat (Berger & Luckmann, 1966).

Dalam konteks Kota Ambon, urgensi penanganan sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan hidup, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola kota, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Ambon telah menyusun regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian digantikan oleh Perda Nomor 7 Tahun 2023 guna memperkuat tata kelola dan menyesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial dan lingkungan. Perda Nomor 7 Tahun 2023 mempertegas beberapa kewajiban yang sebelumnya belum diatur secara detail, antara lain:

- Kewajiban perizinan bagi setiap individu maupun badan usaha yang melakukan kegiatan pendauran ulang, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah (Pasal 31 ayat 1-2). Hal ini memperluas cakupan Pasal 31 Perda 2015 yang hanya mengatur dua jenis izin, yakni pengangkutan dan pengolahan sampah.
- Penambahan sanksi administratif secara lebih rinci, mencakup pencabutan izin, denda administratif, dan penghentian kegiatan (Pasal 31 ayat 6), dibandingkan Perda sebelumnya yang hanya menyebut sanksi administratif umum (Pasal 31 ayat 5 dan 6 Perda 2015).
- Peran pengawasan dan pembinaan diperkuat dalam Pasal 54, yang menetapkan bahwa pembinaan dilakukan melalui fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis oleh perangkat daerah, serta pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala.
- Adanya amanat untuk sosialisasi sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah oleh Pemerintah Daerah (Pasal 30 ayat 1-2), yang sebelumnya tidak ditegaskan dalam Perda 2015.

Sementara itu, Perda Nomor 11 Tahun 2015 masih relevan sebagai dokumen historis dalam upaya tata kelola sampah di Ambon. Beberapa hal yang menjadi pijakan penting dari regulasi tersebut antara lain:

- Penekanan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan pemrosesan sampah (Pasal 45 dan 46).
- Pengaturan tentang peran pelaku usaha dan penyediaan fasilitas TPS/TPS 3R (Pasal 17 dan Pasal 29).
- Penganan insentif dan disinsentif kepada masyarakat dan pelaku usaha (Pasal 33 – 36).

Perubahan regulasi dari Perda 2015 ke Perda 2023 menunjukkan adanya konsolidasi kelembagaan dan penegasan peran serta masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks penelitian ini, regulasi tersebut menjadi bagian penting dari struktur objektif masyarakat, sebagaimana dikaji melalui lensa teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Proses sosialisasi, sosialisasi hukum, serta kesadaran kolektif yang diharapkan dari kebijakan tersebut menjadi bagian dari proses internalisasi norma baru yang idealnya terbentuk di masyarakat. Namun demikian, realitas di lapangan memperlihatkan adanya ketimpangan antara kebijakan yang bersifat top-down dengan praktik budaya masyarakat di bantaran sungai yang masih menjadikan sungai sebagai saluran utama pembuangan sampah domestik. Inilah yang menjadi justifikasi kuat bahwa upaya komunikasi kebijakan dan strategi kampanye pengelolaan sampah berbasis komunitas dan budaya lokal perlu dikaji secara mendalam dalam konteks penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan perkotaan telah menjadi perhatian berbagai kalangan, baik akademisi, pemerintah, maupun masyarakat sipil. Mainake dan Kamulyan (2012) menekankan bahwa pengelolaan sampah di Kota Ambon menghadapi kendala struktural seperti kurangnya personil, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sariyowan et al. (2024) menambahkan bahwa modernisasi pengelolaan sampah terkendala oleh pertumbuhan penduduk dan minimnya edukasi publik.

Fenomena membuang sampah ke sungai juga merupakan praktik sosial yang kompleks. Studi Saptanno et al. (2022) menunjukkan bahwa selama dua dekade terakhir, terjadi peningkatan volume sampah rumah tangga di pesisir Ambon, dengan rendahnya pengetahuan masyarakat sebagai salah satu penyebab utama. Pola ini membentuk budaya yang sulit diubah tanpa intervensi struktural dan komunikasi yang strategis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali perilaku membuang sampah di bantaran sungai Kota Ambon, khususnya di Way Batu Merah dan Way Ruhu Galala-Hative Kecil selama Juni-Juli 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh lokal, dan pihak terkait, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi atas kebijakan daerah (Perda No. 7 Tahun 2023).

Analisis dilakukan secara tematik mencakup dimensi sosial-budaya, strategi komunikasi pemerintah (SCCT), dan objektivasi perilaku masyarakat, dengan validitas diuji melalui triangulasi dan *member checking*. Etika penelitian dijaga dengan menjamin kerahasiaan identitas dan memperoleh persetujuan responden, sehingga metodologi ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif interaksi antara struktur sosial, komunikasi pemerintah, dan budaya buang sampah masyarakat Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan fokus utama pada dua wilayah yang menjadi representasi masalah persampahan di bantaran sungai, yakni Kawasan Way Batu Merah dan Way Ruhu – Galala Hative Kecil, Kecamatan Sirimau. Kedua wilayah tersebut dipilih karena memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan dilintasi oleh sungai-sungai yang bermuara langsung ke Teluk Ambon yang saat ini mengalami tekanan ekologis akibat akumulasi sampah rumah tangga dan plastik. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan selama periode Juni hingga Juli 2025, mencakup proses observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, serta kajian terhadap kebijakan lokal, khususnya Peraturan Daerah Kota Ambon No. 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kunci:

- Warga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan terdampak langsung oleh krisis sampah (6 informan),
- Perangkat RT/RW dan Lurah, termasuk istri ketua RT selaku tokoh lokal perempuan (6 informan),
- Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) dan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon (2 informan),
- Pegiat/aktivis lingkungan, termasuk peneliti dari Skola Rakyat Maluku (KORA), BRIN, serta pekerja penyapu jalan (3 informan),

- Akademisi atau praktisi kebijakan yang terlibat dalam pendampingan masyarakat dan drafting regulasi (1 informan).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa perilaku membuang sampah ke sungai telah menjadi kebiasaan yang meluas dan terinternalisasi, meskipun sebagian warga menunjukkan kesadaran akan dampak lingkungan. Krisis ini diperparah oleh:

- Ketidakterjangkauannya mobil angkutan sampah ke kawasan padat penduduk,
- Ketiadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) resmi di wilayah padat,
- Minimnya fasilitas dan edukasi berbasis komunitas, serta
- Lemahnya penegakan hukum meski regulasi telah tersedia.

Sampah yang mendominasi kawasan bantaran sungai adalah sampah rumah tangga anorganik, terutama plastik sekali pakai, popok bekas, dan limbah makanan. Warga seringkali membakar sampah atau membuangnya ke sungai pada malam hari, dengan dalih tidak adanya pilihan fasilitas pembuangan lain. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum optimal dalam menjalankan strategi komunikasi maupun program teknis pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan latar permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji budaya buang sampah dalam kerangka Teori Konstruksi Sosial, serta mengevaluasi strategi komunikasi pemerintah berdasarkan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) guna merumuskan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis komunitas dalam pengelolaan sampah di wilayah perkotaan pesisir.

Ancaman Sampah di Perairan Teluk Ambon

Ekonomi suatu wilayah mendapat manfaat dari pertumbuhan penduduk yang cepat karena hal ini mendorong pembentukan pusat-pusat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Masalah polusi lingkungan, terutama yang disebabkan oleh sampah komunal, muncul sebagai konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang berlebihan. (Selanno, 2010; Kurniati dan Rizal, 2011).



Gambar 1. Foto-foto Sampah plastik yang berada di sejumlah sungai dan pesisir Teluk Ambon

Sampah di Kota Ambon, yang sebagian besar terdiri dari limbah organik dan anorganik hasil aktivitas harian masyarakat, menjadi masalah lingkungan serius terutama selama musim hujan, karena banyak sungai bermuara ke Teluk Ambon dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Pertumbuhan penduduk, terutama di Kecamatan Sirimau, memperparah timbulan sampah, sementara sampah plastik di pesisir menyebabkan kerusakan ekologis seperti tersumbatnya aliran sungai, rusaknya mangrove, meningkatnya sedimentasi, dan menurunnya populasi ikan. Riset BRIN dan LIPI mengungkapkan bahwa dalam dua dekade terakhir, kepadatan sampah plastik meningkat tajam, khususnya di area padat seperti Pasar Mardika dan Galala, dengan risiko jangka panjang berupa penurunan daya dukung lingkungan dan ancaman banjir rob (Wardhana, 2004; BRIN, 2021; Pelasulla, 2017; Manulang, 2021).

Tabel 1. Daerah Aliran Sungai di Kota Ambon

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Wilayah DAS Wae Batu Merah	7940,27
	a. DAS Wae Tomu	1 564,00
	b. DAS Wae Batu Gajah	545,75
	c. DAS Wae Batu Gantung	1.729,32
	d. DAS Wae Ruhu Galala	1.080,00
	e. Area Penggunaan Lain (APL)	4.021,20
2	Wilayah DAS Wae Pia Besar	13.609,29

Sumber: Program Studi Ilmu Tanah Universitas Pattimura, 2012

Permasalahan sampah di Teluk Ambon telah menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut. Augy Syahailatua, peneliti LIPI, menjelaskan bahwa pencemaran sampah, khususnya plastik, menghambat pertumbuhan biota laut seperti terumbu karang dan ikan, serta mengancam keberlangsungan spesies seperti ikan teri. Teluk Ambon yang dulunya jernih kini tercemar, bahkan menyebabkan penduduk enggan berenang dan mengakibatkan risiko banjir rob karena sedimentasi pesisir. Daniel Pelasulla, peneliti dan inovator BRIN, menekankan bahwa sampah rumah tangga terutama plastik telah meningkat drastis dalam dua dekade terakhir. Ia menyerukan perlunya kolaborasi antara masyarakat, aktivis lingkungan, sektor swasta, dan pemerintah untuk mengatasi krisis sampah di wilayah pesisir Ambon.



Sumber foto: Ecoton

Gambar 2. Salah satu pegiat lingkungan di Kota Ambon melakukan survey sampah plastik di sungai Way Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Daniel menyoroti bahwa sampah laut merupakan masalah utama di Provinsi Maluku, khususnya di Teluk Ambon. Sejak 1995, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah sampah rumah tangga, terutama plastik, yang terakumulasi di teluk tersebut. Laporan LIPI tahun 2017 mencatat adanya lebih dari 51 jenis sampah, dengan konsentrasi terbesar di sekitar pasar Mardika dan Galala. Di antara delapan lokasi pesisir, Desa Poka mencatat persentase sampah tertinggi (47,42%), diikuti oleh Hative dan Kate-Kate. Masalah ini diperparah oleh blooming alga berbahaya, seperti *Pyrodinium bahamense* dan *Gonyaulax spp*, yang muncul akibat pencemaran limbah. Dari 39 sungai yang bermuara ke teluk, 19 berada di kawasan padat penduduk. Sungai-sungai ini menjadi jalur utama sampah rumah tangga menuju laut karena kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai. Daerah seperti Batu Gajah, Skip, Batu Merah, hingga Wayame, disebut sebagai wilayah dengan kebiasaan ini. Pelasulla mencatat bahwa sedimentasi meningkat drastis mencapai 2,4 cm per tahun dan menyebabkan perairan menjadi dangkal. Ia menekankan perlunya pembersihan sampah dan perhatian serius dari pihak berwenang terhadap dampak lingkungan jangka panjang.

Temuan Lapangan: Pola dan Kesadaran Pengelolaan Sampah di RT 03/RW 004 Negeri Hative Kecil

Daniel menyampaikan bahwa masalah utama lingkungan di Provinsi Maluku, khususnya di Teluk Ambon, adalah pencemaran akibat sampah laut, terutama dari limbah rumah tangga. Sejak tahun 1995, terjadi peningkatan signifikan dalam volume sampah, dengan dominasi sampah plastik. Data dari LIPI tahun 2017 menunjukkan bahwa daerah paling tercemar adalah Desa Poka dengan jumlah sampah mencapai 47,42%, disusul oleh Galala (25,18%), Waiheru (15,93%), dan Kate-Kate (11,45%). Sampah plastik di wilayah ini didominasi oleh kemasan makanan ringan dan air mineral sekali pakai, yang merupakan bagian dari aktivitas masyarakat. Sampah tersebut umumnya tidak langsung dibuang ke laut, namun ke sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Ambon. Hal ini diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, yang akhirnya mengalir dan menumpuk di laut, khususnya di daerah pemukiman padat seperti Poka, Galala, dan Passo. Dari total 39 sungai yang bermuara ke Teluk Ambon, 19 sungai berada di wilayah dengan aktivitas permukiman padat, sehingga menjadi jalur utama aliran limbah rumah tangga, minyak, dan sedimen ke teluk. Akibatnya, terjadi ledakan populasi alga (*algal bloom*) yang bersifat beracun, seperti *Pyrodinium bahamense* dan *Gonyaulax spp.*, yang muncul karena kandungan nutrisi dari limbah organik meningkat, menyebabkan kerusakan ekosistem perairan. Menurut Pelasula, laju sedimentasi di Teluk Ambon mencapai 2,4 cm per tahun, angka yang sangat tinggi dan mengindikasikan penumpukan material yang signifikan dari daratan. Pendangkalan teluk ini membahayakan ekosistem dan aktivitas perairan di sekitarnya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk membersihkan sampah dan mengendalikan pembuangan limbah rumah tangga, agar kondisi lingkungan perairan Ambon tidak semakin memburuk.

Pandangan Pemda dan Ahli

Pengelolaan sampah di Kota Ambon mencerminkan persoalan multidimensi yang menuntut keterlibatan aktif dari legislatif, eksekutif, masyarakat sipil, dan kalangan akademik. DPRD Kota Ambon, melalui Ketua Komisi III Harry Putra Far-Far, menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur seperti armada dan alat berat, serta pembangunan budaya sadar lingkungan sejak sekolah untuk mendukung efektivitas kebijakan. Dalam implementasinya, DLHP menghadapi tantangan pembaruan regulasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi retribusi persampahan. Kepala DLHP Alfredo Jansen Hehamahua menggarisbawahi perlunya Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan mekanisme pengelolaan yang adaptif di tingkat lokal. Sementara itu, Mega Rizky Sia dari Skola Rakyat Maluku (KORA) menyoroti peran penting pendekatan edukasi partisipatif berbasis komunitas melalui TPS3R, kampanye visual, dan ruang dialog warga sebagai upaya membangun kesadaran kolektif, namun terbentur minimnya dukungan dan insentif terhadap petugas lapangan. Dari sisi ilmiah, Dr. Yosmina Tapilatu (BRIN) mengungkapkan tingginya pencemaran bakteriologis di Teluk Ambon akibat limbah domestik dan praktik sanitasi pasar yang buruk, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Dr. Abraham Tulalessy (Universitas Pattimura), yang mengkritisi lemahnya regulasi tata ruang dan infrastruktur pengendalian limbah, serta menyarankan solusi berupa pintu air di lima sungai utama dan pembangunan sumur resapan untuk mengurangi aliran sampah ke laut. Keseluruhan pandangan tersebut menekankan bahwa tanpa kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi kebijakan, serta perubahan perilaku masyarakat, maka upaya penanggulangan krisis sampah dan pencemaran lingkungan di Ambon tidak akan berkelanjutan.

Temuan Lapangan

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah pola dan dinamika sosial terkait pengelolaan sampah di bantaran sungai Kota Ambon, khususnya Way Batu Merah dan Way Ruhu Galala. Hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi mengungkapkan bahwa praktik membuang sampah ke

sungai telah berlangsung lama dan cenderung dianggap sebagai perilaku yang normal oleh sebagian masyarakat. Praktik ini terbentuk karena berbagai faktor struktural dan kultural, di antaranya:

1. Tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan terbatasnya armada pengangkut sampah di wilayah padat penduduk.
2. Lemahnya edukasi lingkungan dan kesadaran kolektif warga.
3. Absennya sistem sanksi dan pengawasan yang efektif dari pemerintah.

Sebagian warga menyatakan bahwa sampah yang menumpuk di aliran sungai merupakan "sampah kiriman" dari hulu. Hal ini menunjukkan adanya penyangkalan tanggung jawab dan pembiasaan terhadap kondisi lingkungan yang tercemar.



Foto udara: Christ Belseran (peneliti)

Gambar 3. Dari Kiri-Kanan: Potret Kepadatan bangunan di sekitar sungai Way Ruhu Galala-Hative Kecil dan Sungai Way batu Merah.

Analisis Konstruksi Sosial (Berger & Luckmann)

Analisis konstruksi sosial dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon menunjukkan bahwa proses eksternalisasi tampak melalui cara masyarakat menormalisasi kebiasaan membuang sampah ke sungai sebagai respons terhadap minimnya infrastruktur pengelolaan sampah. Kebiasaan ini bukan hanya tindakan individual, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang berulang dan meluas. Proses objektivasi terjadi saat praktik ini diterima sebagai realitas sosial bersama, di mana sungai dianggap sebagai tempat pembuangan sampah yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sesuatu yang "normal" dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, proses internalisasi tampak ketika anak-anak dan generasi muda mengadopsi kebiasaan tersebut tanpa mempertanyakannya secara kritis. Mereka menerima cara pandang dan perilaku orang dewasa sebagai sesuatu yang wajar dan terus mereproduksinya, memperkuat siklus budaya membuang sampah ke sungai sebagai bagian dari realitas sosial yang diwariskan.

Analisis Respons Komunikasi Krisis (SCCT - Coombs)

Respons komunikasi pemerintah terhadap krisis sampah di Ambon dapat dianalisis melalui pendekatan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT). Pertama, strategi *diminishing* terlihat dari pernyataan pemerintah yang menekankan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta menempatkan sebagian tanggung jawab kepada masyarakat. Ini menunjukkan upaya mengurangi persepsi kesalahan institusi. Kedua, strategi *bolstering* tampak dari upaya pemerintah mempromosikan program Bank Sampah dan pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) sebagai bukti kontribusi positif. Ketiga, strategi *rebuilding* belum tampak signifikan karena pemerintah belum secara eksplisit meminta maaf atau mengakui kesalahan yang merusak kepercayaan publik. Terakhir, strategi *attenuating* digunakan dengan mereduksi krisis sebagai akibat perilaku warga semata, bukan sebagai kegagalan kebijakan struktural. Pendekatan ini

cenderung defensif dan kurang menyentuh akar persoalan, yakni lemahnya sistem pengelolaan sampah dan komunikasi krisis yang partisipatif.

Visualisasi Model Konseptual dan Matriks Teori ↔ Temuan

Untuk memperjelas hubungan antara teori dan temuan lapangan, disusun matriks yang menggambarkan keterkaitan konsep utama dari teori Konstruksi Sosial dan SCCT dengan realitas empirik di Kota Ambon. Dalam teori Konstruksi Sosial, eksternalisasi tercermin dari tindakan warga yang membuang sampah ke sungai karena tidak tersedia TPS. Objektivasi terjadi ketika masyarakat menganggap sungai sebagai tempat pembuangan yang sah. Internalisasi terlihat dari generasi muda yang mengadopsi perilaku tersebut tanpa mempertanyakannya. Sementara dalam kerangka SCCT, strategi *diminishing* muncul saat pemerintah menyoroti keterbatasan dana dan SDM. Strategi *bolstering* ditunjukkan lewat promosi program Bank Sampah dan pembangunan TPST. Namun, strategi *rebuilding* belum dijalankan secara serius karena tidak ada permintaan maaf publik. Strategi *attenuating* tampak dari narasi yang menyalahkan perilaku warga atas krisis tersebut. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa komunikasi krisis di Ambon masih minim pendekatan partisipatif dan kurang menyentuh akar budaya lokal dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Hasil temuan ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan. Perda yang dirancang untuk menjadi payung hukum justru belum menjadi alat edukasi dan advokasi yang kuat bagi perubahan perilaku masyarakat. Pada Bab ini, pembahasan akan mengaitkan kondisi ini dengan strategi komunikasi pemerintah dalam perspektif SCCT, serta dengan konteks pembentukan dan reproduksi perilaku masyarakat dalam kerangka Teori Konstruksi Sosial.

Tabel 2 Matriks Keterkaitan Teori ↔ Temuan Lapangan

Aspek Teori	Konsep Kunci	Temuan Lapangan	Sumber/Kutipan
Teori Konstruksi Sosial	Eksternalisasi	Kebiasaan membuang sampah dianggap biasa karena satu orang mulai, lalu diikuti yang lain.	Matheos Nanulaita (Sekretaris Negeri Hative)
Teori Konstruksi Sosial	Objektivasi	Sampah di sungai dianggap wajar dan menjadi kebiasaan sehari-hari.	Shirley Dangiubun (Warga RT003/04)
Teori Konstruksi Sosial	Internalisasi	Petugas kebersihan marah saat orang membuang sampah di tempat yang telah dibersihkan.	Neli Lesnusa (Pembersih Jalan di Urimesing)
SCCT	Strategi Diminishing	Pemerintah menyampaikan keterbatasan armada dan SDM dalam menangani sampah.	Alfredo Jansen Hehamahua (Kepala DLHP Ambon)
SCCT	Strategi Rebuilding	Lurah menyampaikan permintaan maaf atas minimnya TPS dan menjelaskan keterbatasan staf.	Marlina Haupea (Lurah Rijali)
SCCT	Strategi Bolstering	Pemerintah menyusun Roadmap dan menerima bantuan armada dari PLN.	DLHP Kota Ambon
SCCT	Strategi Attenuating	DPRD dan DLHP menyebut tanggung jawab sampah adalah juga milik masyarakat dan sekolah.	Ketua Komisi III DPRD Ambon

Pembahasan Teoritis

Hasil temuan ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan. Perda yang dirancang untuk menjadi payung hukum justru belum menjadi alat edukasi dan advokasi yang kuat bagi perubahan perilaku masyarakat. Pada pembahasan ini akan mengaitkan kondisi ini dengan strategi komunikasi pemerintah dalam perspektif SCCT, serta dengan konteks pembentukan dan reproduksi perilaku masyarakat dalam kerangka Teori Konstruksi Sosial.

Struktur Sosial dan Objektivasi Budaya Buang Sampah

Mengacu pada Berger & Luckmann (1966), perilaku membuang sampah ke sungai merupakan hasil eksternalisasi dari keterbatasan struktural (akses TPS, mobil sampah). Praktik ini kemudian menjadi objektivasi sosial yang diwariskan secara intergenerasional dan sulit diputus.

Respons Pemerintah dalam Perspektif SCCT

SCCT menekankan pentingnya strategi rebuilding dan bolstering untuk membangun ulang kepercayaan publik. Pemerintah Kota Ambon melalui DLHP telah menyusun RIPS dan menginisiasi pelibatan warga melalui program bank sampah dan TPS3R, meskipun keterbatasan fiskal masih menjadi faktor diminishing. Komunikasi krisis belum secara utuh mencerminkan prinsip-prinsip SCCT yang proaktif.

Analisis dengan Teori Konstruksi Sosial

Eksternalisasi: Asal-Muasal Perilaku Buang Sampah

Berdasarkan wawancara dengan warga, tokoh masyarakat, hingga aparat kelurahan dan negeri, ditemukan bahwa praktik membuang sampah sembarangan telah berlangsung lama dan menjadi ekspresi sosial yang "biasa". Sekretaris Negeri Hative Kecil, Matheos Nanulaita, menjelaskan bahwa kebiasaan ini sudah seperti "tabiat lama". Ia mengatakan, "Karena satu orang buang di situ, maka semua orang beranggapan disitu, itu boleh" (Nanulaita, wawancara, Juli 2025). Ini menunjukkan bahwa tindakan membuang sampah ke kali atau sungai bukan sekadar tindakan individual, melainkan refleksi dari lingkungan sosial yang telah menormalkan kebiasaan tersebut. Eksternalisasi juga terlihat dalam kebiasaan rumah tangga membakar sampah atau membuang di belakang rumah sebagaimana dituturkan oleh Weis Lethulur, Ketua PKK di Negeri Hative Kecil. Ketika fasilitas pengangkutan tidak tersedia, masyarakat menyesuaikan perilakunya secara kultural dan praktis.

Objektivasi: Ketika Sampah Menjadi Realitas Sosial

Kebiasaan yang awalnya merupakan tindakan individual, melalui proses sosial yang terus-menerus, menjadi bagian dari realitas objektif masyarakat. Warga seperti Shirley Dangiubun menilai bahwa membuang sampah ke sungai telah menjadi kebiasaan yang terjadi setiap tahun dan dianggap biasa. Bahkan dalam kondisi di mana larangan telah diterapkan, seperti pemasangan papan peringatan, masyarakat justru mencabut papan tersebut, menunjukkan resistensi terhadap regulasi formal. Objektivasi ini juga ditunjukkan melalui narasi bahwa "sampah kiriman" adalah tanggung jawab wilayah lain. Artinya, masyarakat sudah terbiasa menerima keberadaan sampah tanpa merasa sebagai pelaku langsung. Kesadaran kolektif pun tergeser oleh justifikasi eksternal yang menguatkan kebiasaan tersebut.

Internalisasi: Kesadaran dan Perubahan Pribadi

Beberapa individu menunjukkan adanya proses internalisasi nilai kebersihan. Misalnya, Sekretaris Negeri Hative Kecil mengaku bahwa kesadarannya berubah setelah pengalaman personal dengan peneliti asing yang menunjukkan bahwa tindakan seperti memakai helm bukan karena takut ditilang, tetapi karena kesadaran atas keselamatan. Ia kemudian menyamakan itu dengan kesadaran membuang sampah bukan karena takut hukum, tetapi karena tanggung jawab moral. Petugas kebersihan Neli Lesnusa juga memperlihatkan bentuk internalisasi kuat. Ia mengatakan marah bila melihat orang membuang sampah di tempat yang sudah ia bersihkan, bahkan menegur

secara langsung. Tindakan seperti itu mencerminkan transformasi nilai dari sekadar pekerjaan menjadi tanggung jawab pribadi.

Analisis dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT)

Strategi Diminishing: Menurunkan Skala Krisis

Beberapa pejabat pemerintah seperti Kepala DLHP Kota Ambon menyampaikan bahwa keterbatasan armada dan anggaran menjadi alasan belum optimalnya penanganan sampah. Ini adalah bentuk strategi "diminishing" dalam SCCT, yakni mengurangi tanggung jawab organisasi terhadap krisis dengan menunjukkan bahwa kondisi di luar kendali menjadi faktor utama.

Strategi Rebuilding: Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Pengakuan atas keterbatasan dan permintaan maaf juga muncul dari Lurah Rijali, yang menyatakan bahwa hanya memiliki lima pegawai untuk menangani kawasan yang cukup luas dan padat. Strategi ini termasuk dalam kategori rebuilding, di mana pengakuan dan perbaikan dilakukan secara langsung untuk mengembalikan kepercayaan publik. DLHP dan DPRD juga melakukan pengesahan Perda No. 7 Tahun 2023 dan menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagai bentuk konkret rebuilding. Namun demikian, efektivitas strategi ini masih lemah karena kurangnya pelibatan masyarakat dalam implementasi.

Strategi Bolstering: Menonjolkan Reputasi Positif

Dalam wawancara, pemerintah menyebut telah menerima bantuan armada dari PLN dan menyusun roadmap pengelolaan sampah. Ini adalah bagian dari strategi bolstering, yaitu memperkuat citra positif lembaga sebagai pihak yang aktif dan solutif. Namun, hal ini belum sepenuhnya dirasakan oleh warga di lapangan seperti di kawasan Hative Kecil dan Rijali.

Strategi Attenuating: Membagi Tanggung Jawab

Strategi ini paling dominan digunakan. Hampir semua pejabat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan peran RT/RW, seperti disebut oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon dan DLHP. Pemerintah menekankan bahwa pengurangan sampah adalah tanggung jawab kolektif, di mana warga memiliki porsi besar dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga.

Sintesis Teoretik dan Temuan Lapangan

Kedua teori saling melengkapi. Teori Konstruksi Sosial menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah adalah produk historis dan budaya yang telah terbentuk, menjadi kebiasaan yang dianggap normal oleh sebagian besar masyarakat. Di sisi lain, SCCT menilai bagaimana pemerintah mencoba merespons krisis tersebut melalui strategi komunikasi krisis, meskipun strategi yang digunakan belum cukup menyentuh akar budaya atau menasar transformasi kebiasaan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa penanganan krisis lingkungan seperti sampah tidak cukup dengan pendekatan struktural-formal, melainkan juga perlu pendekatan budaya, edukatif, dan transformasional yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah itu sendiri.

Saran Sintesis Teoritis untuk Penguatan Strategi

Perilaku masyarakat yang lamban berubah juga menunjukkan pentingnya integrasi Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Rendahnya persepsi kontrol perilaku dan lemahnya norma sosial menjadi penghalang adopsi strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Intervensi ke depan perlu memperkuat sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol melalui pendekatan berbasis komunitas dan budaya lokal.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan di bantaran sungai di Kota Ambon tidak semata-mata lahir dari ketidaktahuan, melainkan merupakan

hasil dari proses sosial yang kompleks. Dalam konteks *Teori Konstruksi Sosial* (Berger & Luckmann, 1966), proses eksternalisasi tercermin dari tindakan warga yang membuang sampah karena tidak adanya akses terhadap TPS, kurangnya armada pengangkut, serta kebiasaan turun-temurun yang belum pernah dikoreksi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur sosial dan kondisi infrastruktur turut melahirkan dan melanggengkan perilaku tersebut. Proses objektivasi terjadi saat masyarakat menganggap tindakan buang sampah ke sungai sebagai hal yang lumrah dan tidak dipermasalahkan, mencerminkan pembentukan realitas simbolik yang diwariskan tanpa refleksi kritis. Selanjutnya, melalui proses internalisasi, anak-anak turut meniru kebiasaan ini dari orang tua, mengindikasikan bahwa budaya buang sampah sudah tertanam sejak dini melalui pembelajaran sosial informal.

Dalam dimensi komunikasi pemerintah, temuan di lapangan menunjukkan bahwa strategi yang dominan digunakan adalah *diminishing* dan *bolstering*, seperti menyalahkan masyarakat atau menonjolkan pencapaian yang tidak substansial. Padahal menurut *Situational Crisis Communication Theory* (Coombs, 2007), strategi *rebuilding* yang lebih empatik dan transparan sangat penting dalam konteks krisis lingkungan. Pemerintah belum sepenuhnya menerapkan strategi ini, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sampah rendah. Demikian pula, efektivitas implementasi Perda No. 7 Tahun 2023 masih rendah karena minim sosialisasi dan belum menyentuh tingkat RT/RW. Dari sisi perilaku, *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dapat menjelaskan mengapa sebagian warga tetap membuang sampah ke sungai meski tahu hal tersebut salah. Mereka merasa tidak memiliki pilihan lain karena kurangnya fasilitas dan norma sosial yang membiarkan perilaku tersebut berlangsung.

Secara praktis, temuan ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya membangun TPS3R dan menambah armada pengangkut, tetapi juga menyoroti perubahan norma kolektif dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan pendidikan. Kampanye publik yang menyentuh dekonstruksi budaya "normalisasi" buang sampah sangat penting. Sekolah, rumah ibadah, dan komunitas harus terlibat dalam kurikulum lokal pengelolaan sampah. Di sisi lain, membentuk forum kolaboratif lintas aktor seperti Forum Peduli Sungai Ambon dan Posko Kampung Bebas Sampah menjadi strategi konkret untuk mengintegrasikan peran pemerintah, warga, pemuda, dan lembaga lainnya dalam satu gerakan bersama pengelolaan sampah berbasis komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku membuang sampah ke sungai di Kota Ambon bukanlah sekadar tindakan individu, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk akibat keterbatasan infrastruktur, lemahnya kontrol sosial, dan minimnya edukasi lingkungan. Dalam kerangka Berger dan Luckmann, praktik ini terjadi melalui proses eksternalisasi karena keterbatasan layanan publik, objektivasi melalui normalisasi budaya buang sampah, dan internalisasi oleh generasi muda. Di sisi lain, strategi komunikasi pemerintah dalam mengelola krisis sampah masih bersifat parsial berdasarkan analisis SCCT; strategi *diminishing* dan *attenuating* lebih dominan, sementara *rebuilding* dan *bolstering* belum terintegrasi secara menyeluruh. Strategi yang efektif seharusnya mengedepankan pendekatan partisipatif berbasis budaya lokal, melibatkan tokoh masyarakat, bahasa dan metode komunikasi yang kontekstual, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga sebagai subjek perubahan.

Saran

Penelitian mendatang disarankan mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) untuk menguji hubungan antara sikap, norma, persepsi kontrol, dan perubahan perilaku secara kuantitatif. Pendekatan campuran (*mixed methods*) juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas intervensi pemerintah berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arikunto, S. 2022. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Augy Syahailatua, 2022. Ambon Darurat Sampah, Limbah Medis, Hingga Merk Unilever Tercecer di Pantai dan Sungai diakses melalui titastory, ([Ambon Darurat Sampah, Limbah Medis Hingga Merk Unilever Tercecer di Pantai dan Sungai | TitaStory](#))
- Augy Syahailatua, 2022. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Biota Laut Teluk Ambon dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kota Ambon dalam Angka 2023. BPS Kota Ambon.
- Berger & Luckmann. (1966), "Tafsir Sosial atas Kenyataan (1990) oleh Frans M. Parera", Bahasa dan Pengetahuan dalam Kehidupan Sehari-hari
- Berger, Peter L & Thomas Luckman (Frans M Parera), 2018. Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, Penerbit LP3ES Jakarta
- BSKDN Kemendagri. (2023). Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola (https://bskdn.kemendagri.go.id/website/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola/?utm_source=chatgpt.com)
- Coombs, W. T. (2007). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding*. Sage Publications.
- Cory Yanti Manulang, Peneliti BRIN Ambon. 2021, The abundance of Plastic Marine Debris on Beaches in Ambon Bay
- Cresswell, J.W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Daniel Pelasula, 2023. (Titastory.id). Ambon Darurat Sampah, Limbah Medis, Hingga Merk Unilever Tercecer di Pantai dan Sungai. ([Ambon Darurat Sampah, Limbah Medis Hingga Merk Unilever Tercecer di Pantai dan Sungai | TitaStory](#))
- Danim, S. 2022. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Desy Safitri, Juli 2020. *Ekolebel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*
- Dukcapil Kota Ambon, 2022. *Data Jumlah Penduduk di Kota Ambon*
- Elsa Melsasail dan Oce Salahkory. (2025), wawancara oleh Christ Belseran, Juli 2025, RT 03/RW 04 Bantaran Sungai Wairuhu, Ambon.
- Elvira Chandra Dewi Ari Nanda, GoodStats. (2025). Kementerian LH Larang Impor Sampah Pada 2025. (https://goodstats.id/article/survei-goodstats-masyarakat-nilai-pemerintah-masih-buruk-dalam-hadapi-masalah-sampah-vx4EO?utm_source=chatgpt.com)
- G. Tyler Miller, Jr. and Scott E. Spoolman. *Environmental Science*
- Harry Putra Far-Far, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon (2025). Wawancara Peneliti Christ Belseran soal Pandangan DPRD Kota Ambon terhadap Penanganan Sampah dan Partisipasi Masyarakat.
- Hasil wawancara Daniel Pelasula di Ambon, Mongabay Indonesia. 2023. [Kala Sungai di Lombok Tercecer Mikroplastik, Limbah Medis pun Ditemukan di Perairan Ambon \[1\] - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id](#)
- Hehamahua, A. J. (2025, Juli 21). Wawancara pribadi oleh Peneliti, Christ Belseran. Ambon.
- Ibid, Daniel Pelasula, 2023.

- Imam Gunawan, (2021), Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik/Imam Gunawan: editor, Suryani, Bumi Aksara.
- Kartono, K. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kemenko PMK. (2023). 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik (https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik?utm_source=chatgpt.com)
- KURNIAWAN, Saeful, et al. (2023), Paradigma Penelitian Fenomenologi Verstehen (Konsep dan Implimentasinya). GUEPEDIA.
- Lesnusa, N. (2025). Wawancara oleh Christ Belseran, 20 Juli. Urimesing, Kota Ambon.
- Mainake, Y. N., & Kamulyan, M. (2012). Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Ambon. Universitas Gadjah Mada. Diakses dari: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/56392>
- Marlinda Irwanti, Manajemen Krisis Komunikasi: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Krisis Lingkungan dan Sosial.
- Miller, 2004. *Living In the Environment*. United Stated, Thomson Brooks/Cole
- Nanulaita, M. (2025, 23 Juli). Wawancara langsung mengenai perilaku buang sampah di Negeri Hative Kecil. Wawancara oleh Christ Belseran.
- Patton, M.Q. 2001. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage Publications
- Pemerintah Kota Ambon, Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 12 dan 13 Tahun 2016, sebagai turunan teknis dari Perda Nomor 11 Tahun 2015.
- Pemerintah Kota Ambon. (2015). Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Ambon: Pemkot Ambon.
- Pemerintah Kota Ambon. (2023). Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Ambon: Pemkot Ambon.
- Prigi Arisandi, dkk, ECOTON, (2023), 80% Responden Menyatakan Pemerintah Abaikan Pengelolaan sungai Indonesia.
- Rene Descartes (dalam pandangan Imam Gunawan), 2021.
- Sariyowan, A., Mairuhu, J. A., & Parera, C. (2024). Waste Management by the Department of Environment and Sanitation of Ambon City. ResearchGate. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/383994294>
- Seger, M.W., Sellnow, T.L., & Ulmer, R.R. (2023), Marlinda Irwanti, Manajemen Krisis Komunikasi: Tinjauan Teoritis dan Praktis, 2023: 15)
- Selanno, D.A.J. 2010. Alih Fungsi Sungai Sebagai Tempat Pembuangan Sampah dan Strategi Pengendaliannya. *Jurnal Triton* Vol.6 No.2. Hal 19-29.
- Tapilatu, Y. (2023). Ambon dalam Ancaman Bakteri Laut: Risiko Patogen dan Limbah Sampah Domestik. *titastory.id*, (<https://www.titastory.id/artikel/ambon-darurat-sampah-limbah-medis>), diakses 23 Juli 2025.
- Tapilatu, Y. (2023). Wawancara pribadi dengan Dr. Yosmina Tapilatu, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Laut Dalam BRIN, 23 Juli 2025, Ambon.
- Theodeor Ludwig W Adorno (dalam Frengky Napitupulu, 2022: 62-63), Komunikasi dan Agenda Penyadaran: Kritik, Teori, dan Metodologi.
- Theodeor Ludwig W Adorno (dalam Frengky Napitupulu, 2022: 64), Komunikasi dan Agenda Penyadaran: Kritik, Teori, dan Metodologi.
- Tulalessy, A. (2023). Wawancara pribadi dengan Dr. Abraham Tulalessy, Direktur Pusat Studi Lingkungan Universitas Pattimura, 24 Juli 2025, Ambon.

Wardhana A.W. 1999; 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal: 459
Weis Lethulur, wawancara oleh Christ Belseran, 22 Juli 2025, Negeri Hative Kecil, Ambon.
Wikipedia.(2023). Ambon, Maluku. Diaksesdari: https://en.wikipedia.org/wiki/Ambon,_Maluku
Yin, R. 2009. *Case Study Research: Design and Method*, Beverly Hills, CA: Sage Publication